

**PENGARUH PENGELOLAAN LABA
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN
MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

ROCHMAN ADI BOWO

NIM. C2COO7116

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rochman Adi Bowo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007116
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELOLAAN LABA
TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DENGAN MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si.,Akt.

Semarang, 21 Juli 2014

Dosen Pembimbing

(Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si.,Akt.)

NIP. 19690214 199412 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rochman Adi Bowo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007116
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELOLAAN LABA
TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DENGAN MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal.....2014

Tim Penguji

1. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si.,Akt. (.....)
2. Dr. Darsono, S.E., M.BA.,Akt. (.....)
3. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si.,Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rochman Adi Bowo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENGELOLAAN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERATING** (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2012-2013) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juli 2014

Yang membuat pernyataan,

(Rochman Adi Bowo)

NIM : C2C007116

ABSTRACT

This research was aimed to examine empirically: (1) The influence of earnings management to CSR disclosure (2) The role of corporate governance mechanism as moderating variable in the relationship between earnings management and CSR disclosure. Corporate governance mechanism was analyzed by proportion of independent commissioner, the number of audit committee meetings and board size. Earnings management was measured by discretionary accruals use Modified Jones Model and the extent of CSR was measured used corporate social reporting index (CSRI) based on Global Reporting Initiative (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies annual report.

This research used samples of company listed on Indonesia Stock Exchange 2012-2013. Data obtained from annual reports and sustainable reports of manufacturing companies listed on the IDX. There are 65 companies among 2012-2013 which fulfilling. The method of analysis of this research was multiple regression. This method was chosen because the independent variables are more than one and all the data of the variables are metric.

This reseach found no significant statistical effect from various measurement of earnings management to CSR disclosure. The research also found there is no significant effect on proportion of independent commissioner, board size, and the number of audit committee meetings in relationship between earnings management and CSR disclosure. This research concluded that CSR is driven by the desire to meet the expectation of stakeholders and not due to earnings management. In addition, the formation of the board of commissioners need to consider the composition of ability and integrity of the members so that they can perform the function of monitoring, control and able to provide direction to management as well.

Key words: Corporate Social Responsibility Disclosure, Earnings Management, Corporate Governance Mechanism.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris: (1) pengaruh pengelolaan laba terhadap pengungkapan CSR (2) pengaruh *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara pengelolaan laba dan pengungkapan CSR. Mekanisme *corporate governance* dianalisis dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan proporsi dewan komisaris independen. Pengelolaan laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* dengan model *modified Jones* dan luas pengungkapan CSR diukur dengan *Corporate Social Reporting Index* (CSRI) berdasarkan ítem stándar *global reporting index* (GRI) yang diungkapkan dalam *annual report*.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. Data diperoleh dari *annual report* dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Terdapat 65 perusahaan selama tahun 2012-2013 yang memenuhi kriteria. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Metode ini dipilih karena variabel independen lebih dari satu dan semua data dari variabel adalah metrik.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini juga menemukan pengaruh yang tidak signifikan dari ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan proporsi dewan komisaris independen. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengungkapan CSR didorong oleh adanya keinginan untuk memenuhi harapan *stakeholder* dan tidak dikarenakan adanya pengelolaan laba. Selain itu juga dalam pembentukan dewan komisaris perlu memperhatikan komposisi kemampuan dan integritas anggota sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik.

Kata kunci : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pengelolaan Laba, *Mekanisme Corporate Governance*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Laba Terhadap Pengungkapan tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Mekanisme *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating”**. Serta Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si.,Akt. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dengan sabar mendengar keluh kesah penulis dan dengan bijaksana membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak ternilai harganya selama penulis menempuh studi hingga akhir.

4. Kedua orang tua, ayahanda Sri Darwanto, dan ibunda Siti Asiyah yang selalu berdoa, memberikan nasihat, arahan dan dukungan yang tiada batas kepada penulis untuk tetap bersemangat dan optimis dalam menghadapi segala sesuatunya. Bapak, terima kasih atas kedisiplinan, bekerja keras, sikap pantang menyerah, kejujuran dan semangat yang telah engkau ajarkan dan tularkan kepada kami. Terima kasih juga kepada ibu untuk semua perhatian, kasih sayang, ajaran beliau untuk selalu optimis dalam menghadapi hidup dan ajaran untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain sehingga mampu membentuk kami menjadi pribadi yang lebih peduli dan tangguh. Bapak dan Ibu, engkau benar-benar orang tua terbaik dan teladan bagi kami semua.
5. Kepada kakak dan adik-adikku ; mas Ravi, dik Ari, dik Zen, mbak nik, dik jehan, dik razka yang selalu mendukungku baik moril maupun materil, selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi dan nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga Besar di Kudus dan Blora terima kasih atas doanya..
7. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi 2007, Andrian, wawan, ias dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu "*I'm really pleased to know you all*"
8. Temen sekos; Pak Surip, Roni, pupung, Bagus. hari-hari penuh tawa dan kebahagiaan selalu kudapatkan bersama kalian

9. Remaja mushola Darussalam, mas Rus, mas Ngadiyono, mas Agus, pak Heri, pak Joko, pak Bisri, mas Santoso. trims telah memberikanku ruang untuk berubah menjadi insan lebih baik.
10. Buat anak-anak KSEI dan ROHIS: Ias, Dymas, Pram, Andrian, Wawan, Adit, Rino dll..yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.Terima kasih kawan atas pengalamanya
11. Anak-anak PA4 Endro, Alit, Ndemak, Pujek, Hombing, Zaenal, Yayan, Ulul....” perjuangan belum usai”
12. Jagoanku jaliteng yang rela menemani penulis selama menyelesaikan kuliah, serta berkenan untuk dipotong anggaran perawatannya dan isi bensin dikala penulis sedang dilanda krisis keuangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik dan berlimpah

Semarang, Juli 2014

Penulis,

Rochman Adi Bowo

MOTTO

“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN.
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN)
KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH URUSAN YANG LAIN
DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH HENDAKNYA KAMU
BERHARAP”.

(Q.S. AL NASR : 6 – 8)

“SESUNGGUHNYA ALLAH SWT TIDAK AKAN MENGUBAH KEADAAN
SUATU KAUM SEHINGGA MEREKA MENGUBAH KEADAAN YANG
ADA
PADA MEREKA SENDIRI”

PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, KARYA
KECIL INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:
BAPAK DAN IBU, YANG TELAH MEMBERIKAN KASIH SAYANG SERTA
DO`A – DO`ANYA SELAMA INI.

KAKAK DAN ADIK – ADIKKU, YANG TELAH MEMBERIKAN
SEMANGAT SERTA DUKUNGAN SEJAK AWAL HINGGA AKHIR.
BAPAK DAN IBU GURU, GURU SD, GURU NGAJI, GURU SMP, GURU
SMU, DAN DOSEN FE UNDIP YANG TELAH MEMBERIKAN ILMUNYA
TANPA MENGHARAPKAN BALAS JASA.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.... Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3... Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	10

2.1.1.	Teori keagenan	10
2.1.2.	Teori sinyal	12
2.1.3.	Teori Stakeholder	13
2.1.4.	Teori Legitimasi	15
2.1.5.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	16
2.1.6.	Pengelolaan Laba	17
	2.1.6.1. Pengertian Pengelolaan Laba	17
	2.1.6.2. Motivasi Pengelolaan Laba	18
	2.1.6.3. Pola Pengelolaan Laba	20
	2.1.6.4. Teknik Pengelolaan Laba	21
2.1.7.	Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	22
	2.1.7.1. Dewan Komisaris	24
	2.1.7.2. Komite Audit	25
	2.1.7.3. Komisaris Independen	26
2.1.8.	Variabel Kontrol	28
	2.1.8.1. Ukuran Perusahaan	28
	2.1.8.2. Profitabilitas	28
	2.1.8.3. <i>Leverage</i>	28
2.2.	Penelitian Terdahulu	29
2.3.	Kerangka Pemikiran	34
2.4.	Hipotesis	35
	2.4.1. Pengaruh Pengelolaan Laba terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	35

2.4.2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dalam memoderasi Pengaruh Pengelolaan Laba terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	37
2.4.3. Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit Dalam Memoderasi Pengaruh Hubungan Pengelolaan Laba terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	38
2.4.4. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Dalam memoderasi Pengaruh Pengelolaan Laba terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1..... Variabel Penelitian dan Definisi Penelitian.....	42
3.1.1. Variabel Dependen	42
3.1.1.1. Tanggung jawab Sosial perusahaan	42
3.1.2. Variabel Independen	43
3.1.2.1. Pengelolaan Laba	43
3.1.3. Variabel Moderating	45
3.1.3.1. Proporsi Komisaris Independen.....	45
3.1.3.2. Komite Audit	46
3.1.3.3 Ukuran Dewan Komisaris.....	46
3.1.4. Variabel Kontrol	46
3.1.4.1. Ukuran Perusahaan	47
3.1.4.2. Profitabilitas.....	47
3.1.4.3. <i>Leverage</i>	48

3.2.	Populasi dan Sampel	50
3.3.	Jenis Sumber Data	51
3.4.	Metode Pengumpulan Data	51
3.5.	Metode Analisis	51
	3.5.1. Statistik Deskriptif	
	3.5.2. Uji Asumsi Klasik	52
	3.5.2.1. Uji Normalitas	52
	3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas	53
	3.5.2.3. Uji Multikolonieritas	53
	3.5.2.4. Uji Autokorelasi	55
	3.5.3. Analisis Regresi Berganda	55
	3.5.4. Uji Hipotesis	57
	3.5.4.1. Koefisien Determinasi	58
	3.5.4.2. Uji Statistik F	58
	3.5.4.3. Uji Statistik t	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	60
4.2.	Metode Analisis	61
	4.2.1. Analisis statistik deskriptif	61
	4.2.2. Uji asumsi klasik	64
	4.2.3 Hasil pengujian regresi	64
4.3.	Pembahasan	81

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	86
5.2.	Keterbatasan Penelitian	88
5.3.	Saran	88
Daftar Pustaka	90
Lampiran-lampiran	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan penelitian terdahulu.....	31
Tabel 3.1	Ringkasan indikator pengukuran variabel.....	47
Tabel 4.1	Ringkasan perolehan sampel penelitian.....	60
Tabel 4.2	Hasil analisis statistik deskriptif.....	61
Tabel 4.3	Hasil uji kolmogrov-smirnov model regresi I.....	64
Tabel 4.4	Hasil uji kolmogrov-smirnov model regresi II.....	64
Tabel 4.5	Uji Glejser CSRI dan pengelolaan laba.....	66
Tabel 4.6	Uji Glejser CSRI dan mekanisme GCG.....	66
Tabel 4.7	Hasil uji multikolinearitas CSRI dan pengelolaan laba.....	67
Tabel 4.8	Hasil uji multikolinearitas CSRI dan pengelolaan laba (VIF).....	68
Tabel 4.9	Hasil uji multikolinearitas CSRI dan mekanisme GCG.....	69
Tabel 4.10	Hasil uji multikolinearitas CSRI dan mekanisme GCG (VIF).....	69
Tabel 4.11	Hasil uji autokorelasi CSRI dan pengelolaan laba.....	71
Tabel 4.12	Tabel Durbin Watson CSRI dan pengelolaan laba.....	71
Tabel 4.13	Hasil uji autokorelasi CSRI dan mekanisme GCG.....	72
Tabel 4.14	Tabel Durbin Watson CSRI dan mekanisme GCG.....	72
Tabel 4.15	Hasil uji statistik F CSRI dan pengelolaan laba.....	73
Tabel 4.16	Hasil uji statistik F CSRI dan mekanisme GCG.....	74
Tabel 4.17	Hasil uji koefisien determinasi CSRI dan pengelolaan laba.....	74
Tabel 4.18	Hasil uji koefisien determinasi CSRI dan mekanisme GCG.....	75
Tabel 4.19	Hasil uji statistik T CSRI dan pengelolaan laba.....	76
Tabel 4.20	Hasil uji statistik T CSRI dan mekanisme GCG.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	34
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Daftar indikator pengungkapan CSR menurut GRI	92
LAMPIRAN B Daftar perusahaan sampel.....	100
LAMPIRAN C Data pengolahan SPSS	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk komunikasi perusahaan yang bertujuan membina hubungan baik dengan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Gray *et al.* (1995) pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bentuk legitimasi dan kontribusi sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, dalam kenyataannya terdapat audit yang tidak sempurna, hal ini mendorong para manajer untuk mengambil tindakan-tindakan *discretionary* atas laba yang dilaporkan. Healy dan Wahlen (1999) berpendapat bahwa pengelolaan laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para *stakeholder* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan.

Para manajer secara sukarela terdorong untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka menarik para investor dan meningkatkan citra perusahaan, terutama ketika mereka melakukan pengelolaan laba. Konflik timbul ketika tindakan oportunistis manajemen yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, hal ini dapat merugikan pemegang saham (*shareholder*) atau investor karena informasi laba yang disajikan dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah. Tindakan oportunistis tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan memilih

kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya dikenal dengan istilah pengelolaan laba.

Pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan merupakan sarana untuk menjamin tindakan pengelolaan laba yang dilakukan oleh para manajer, dengan cara mengalihkan perhatian *shareholders* dari pengawasan aktivitas pengelolaan laba. Manajer yang terlibat dalam praktik pengelolaan laba termotivasi untuk berperilaku proaktif mencari persepsi dari para pemegang saham dan beragam kelompok *stakeholder* dengan mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kinerja yang optimal. Jadi, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara sukarela dalam *annual report*, dipandang perlu untuk menunjukkan kepada para *stakeholder* mengenai kesadaran perusahaan akan kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menginformasikan upaya-upaya yang dilakukan oleh managerial perusahaan dalam mengelola laba dan sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan membantu dalam mengurangi atau meningkatkan pengelolaan laba.

Mekanisme *corporate governance* mampu mengontrol perilaku pengelolaan laba oleh manajer yang berawal dari adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan. berdasarkan penelitian Klein (2002) yang menemukan bahwa dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan pengelolaan laba. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka tindakan pengawasan semakin meningkat, sehingga

dapat mengurangi tindakan pengelolaan laba. Komite audit yang semakin aktif memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memantau tindakan manajemen. Pernyataan ini didukung oleh Xie *et al.*, (2003) yang menyatakan bahwa komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar untuk secara efektif memantau akrual diskresioner jangka pendek.

Penelitian mengenai pengaruh pengelolaan laba terhadap CSR telah dilakukan sebelumnya oleh Prior *et al.*, (2008), Chih *et al.*, (2008), Handajani *et al.*, (2008) dan Sun *et. al* (2010). Prior *et al.*, (2008) meneliti hubungan CSR dan pengelolaan laba dengan dasar asumsi, praktek pengelolaan laba akan memiliki dampak negatif terhadap hubungan perusahaan dengan *stakeholder* serta reputasi perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kepuasan *stakeholder*, perusahaan berusaha melakukan praktek CSR. Penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif antara CSR dengan pengelolaan laba. Dari penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan pengelolaan laba berusaha untuk mengelabui *stakeholder* dengan melibatkan diri secara proaktif dalam kegiatan CSR.

Chih *et al.*, (2008) menguji empat hipotesis yang menghubungkan pengelolaan laba dengan CSR. *Myopia avoidance hypothesis*, berdasarkan hubungan negatif yang terjadi antara pengelolaan laba dan CSR, *predictable earnings hypothesis*, *multiple earnings hypothesis* yang menunjukkan hubungan positif antara pengelolaan laba dan CSR, dan yang terakhir adalah *institutional hypothesis* yang menunjukkan hubungan netral antara CSR dan EM. Dalam menguji hubungan pengelolaan laba dan CSR, Chih *et al.*, (2008) menggunakan

tiga proksi untuk mengukur pengelolaan laba, antara lain *earnings smoothing*, *earnings aggressiveness*, dan *earnings losses avoidance*. Penelitian tersebut menemukan adanya perbedaan pengaruh pengelolaan laba terhadap CSR untuk ketiga proksi tersebut. Pengelolaan laba yang diproksikan dengan *earnings smoothing* dan *earnings losses avoidance* menunjukkan pengaruh negatif terhadap CSR sehingga hal tersebut mendukung *myopia avoidance hypothesis*. EM yang diproksikan dengan *earnings aggressiveness* menunjukkan pengaruh positif terhadap CSR sehingga hal tersebut mendukung *multiple objective hypothesis*.

Handajani *et al.*, (2008) yang menguji pengaruh pengelolaan laba dan *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengelolaan laba dan *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Sun *et. al* (2010) dengan proksi *corporate governance* yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah pertemuan komite audit. Sun *et. al* (2010) meneliti pengaruh pengelolaan laba (*earning management/EM*) terhadap *corporate environmental disclosure* dengan asumsi dasar perusahaan yang melakukan pengelolaan laba mempunyai insentif untuk melakukan *corporate environmental disclosure* (CED) sebagai alat untuk mengacaukan perhatian *stakeholders* atas kecurangan tersebut. Penelitian Sun *et.al* (2010) ini dilakukan pada semua perusahaan yang terdaftar di *Financial Times* dan the *London Stock Exchange* (FTSE) periode 1 April 2006 sampai 31 Maret 2007. Sampel akhir yang didapat adalah 245 perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan laba dan CED, begitu pula ukuran dewan komisaris sebagai variabel moderating. Sedangkan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengaruh pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini merupakan ekspansi dari penelitian Sun *et.al* (2010). CED diperluas menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, karena pengungkapan yang diwajibkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Proksi CG yang digunakan adalah: ukuran dewan komisaris, jumlah pertemuan komite audit dan proporsi dewan komisaris independen. Variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas yang diproksi menggunakan *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan yang diproksi dengan total asset, dan *leverage* yang diproksi dengan *debt equity ratio* (DER). Sampel pada penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul:
**“PENGARUH PENGELOLAAN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh antara pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel

moderating. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menganalisis adanya pengaruh antara pengelolaan laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) menguji hubungan *discretionary accrual* sebagai variabel dependen dengan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut adalah keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap akrual kelolaan (diskresioner laba) dan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap diskresioner laba secara parsial. Sedangkan penelitian lain yang pernah dilakukan di luar Indonesia misalnya penelitian oleh Prior *et al.* (2008) yang meneliti hubungan *corporate social responsibility* (CSR) dan pengelolaan laba dengan dasar asumsi praktik pengelolaan laba akan berpengaruh negatif atas hubungan perusahaan dengan *stakeholder* dan reputasi perusahaan. Penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif antara pengelolaan laba dengan CSR dan kombinasi praktik CSR dan pengelolaan laba yang berdampak negatif terhadap kinerja finansial perusahaan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel yang digunakan, periode waktu ataupun variabel kontrol yang digunakan. sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ?

2. Apakah pengaruh antara pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris ?
3. Apakah pengaruh antara pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan jumlah pertemuan komite audit ?
4. Apakah pengaruh antara pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan proporsi dewan komisaris independen ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris:

1. Pengaruh pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengaruh pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian mengenai konsep atau teori CSR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi praktisi, sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan keputusan terkait pengungkapan lingkungan perusahaan, mekanisme *corporate governance* dan pengelolaan laba.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan teori yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang defenisi operasional yang terdapat dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan metodologi yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian serta menguraikan pembahasan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial, defenisi dan motif

pengelolaan laba karakteristik dewan komisaris dan komite audit. Pembahasan masalah ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap penerapan *good corporate governance* dan keterbatasan dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.5. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen). Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih *principal* mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen and Meckling, 1976). Dalam hal ini, pihak yang disebut *principal* adalah pemegang saham atau investor sebagai pemilik perusahaan dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Teori agensi adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh investor dan pengendalian perusahaan oleh manajemen. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham ingin mengetahui semua informasi di perusahaan termasuk aktivitas manajemen yang dapat memberikan nilai positif. Salah satu tindakan manajemen yang dapat memberikan nilai positif yaitu dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan *image* perusahaan dan menunjukkan kontribusi sosial, ekonomi, dan lingkungan pada masyarakat sekitar.

Konflik keagenan timbul ketika manajer melakukan tindakan oportunistik, pengelolaan laba, untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Tindakan

manajerial tersebut dapat menyesatkan *stakeholder* tentang nilai pasar dan posisi keuangan perusahaan, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konflik muncul ketika agen tidak selalu berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan *principal*, sehingga menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss* (Jensen dan meckling, 1976). Adanya penyimpangan yang diambil oleh agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan agen akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan *principal*, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut *residual loss* (Jensen dan meckling, 1976).

Adanya kelonggaran dalam pemilihan metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan membuat perusahaan menghasilkan nilai laba yang berbeda melalui pemilihan metode akuntansi yang berbeda. Praktik seperti ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas laba yang dilaporkan. Salah satu cara yang paling efisien untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda (*World Bank*, 1999). *Corporate governance* merupakan salah satu cara yang diasumsikan dapat mengontrol konflik yang terjadi dengan monitoring melalui tata perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan

yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007).

2.1.2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Teori sinyal juga menyatakan bahwa manajemen merupakan orang yang selalu berusaha untuk memaksimalkan insentif yang diharapkan. Manajemen mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar tentang perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dengan para pemegang saham. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk *et al.*, 2000).

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Pengungkapan lingkungan merupakan sebuah sinyal/informasi bagi investor tentang prospek perusahaan. Sinyal *goodnews* diberikan apabila pengungkapan lingkungan yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan harapan *stakeholders*.

Perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham.

2.1.3. Teori Stakeholders (*Stakeholders Theory*)

Teori *stakeholder* menjelaskan hubungan antara *stakeholders* dan informasi yang mereka dapat (Sun *et.al*, 2010). Manajer dapat dipekerjakan tidak hanya sebagai agen pemilik tetapi juga sebagai agen *stakeholders* yang lain (Hill dan Jines, 1992). Manajer dapat mengambil tindakan pengelolaan laba untuk memperoleh keuntungan pribadi yang diperoleh dari *stakeholder* yang lain. Meskipun demikian, *stakeholder* akan merespon tindakan manajemen berkaitan dengan kepentingannya. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. *Stakeholder* dianggap dapat mempengaruhi tapi juga dapat dipengaruhi perusahaan. Menurut Ghazali dan Chariri (2007) perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* nya (pemegang saham kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Oleh karena itu, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Clarkson (1995) menyatakan bahwa ada dua jenis *stakeholder* berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang sangat berpengaruh dalam perusahaan dan tanpa mereka perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going*

concern, meliputi : pemegang saham dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Stakeholder merupakan pihak yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan sehingga *stakeholder* dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mempengaruhi pemakaian berbagai sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan sehingga *stakeholder* dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Stakeholder pada dasarnya dapat mempengaruhi pemakaian berbagai sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan sehingga pada umumnya teori stakeholder umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengaruh *stakeholder* tersebut. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu cara untuk menjaga hubungan perusahaan

dengan stakeholder-nya. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat mengelola stakeholder agar mendapatkan dukungan oleh para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.4. Teori Legitimasi (*Legitimation Theory*)

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi/perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma–norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi). Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak publik (Deegan dan Rankin, 1996).

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori *legitimacy* adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial bahwa:

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.”

Setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai–nilai yang dijunjung didalam masyarakat. Biaya yang tinggi akan muncul disebabkan masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu,

perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program-program yang sesuai dengan harapan masyarakat. Implementasi riilnya adalah melalui pelaksanaan program *corporate social responsibility* dan mengungkapkannya baik di dalam *annual report* maupun *sustainability report* sebagai suatu bentuk informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat.

2.1.5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *Voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pendukung pendapat tersebut menyatakan bahwa jika suatu informasi tidak diungkapkan hal ini disebabkan informasi tersebut tidak relevan bagi investor atau informasi tersebut telah tersedia di tempat lain.

Laporan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat non keuangan seperti CSR telah diatur dalam undang-undang dan bersifat *mandatory* melalui Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang no.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa hal yang mendukung namun berkaitan dengan aspek lingkungan, belum terdapat suatu peraturan yang benar-benar mengatur tentang pengungkapannya. *Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Pada umumnya terdapat pada bagian terpisah pada *sustainability report* atau tercantum dalam *annual report*. Di Amerika, SEC bertanggungjawab pada masalah tingkat pengungkapan sedangkan format pengungkapan menjadi tugas FASB. Sedangkan di Indonesia yang memiliki otoritas pengungkapan *mandatory* adalah Bapepam

2.1.6. Pengelolaan Laba

2.1.6.1. Pengertian Pengelolaan Laba

Dasar akrual dalam penyajian laporan keuangan dapat dimanfaatkan manajemen untuk sedikit menggerakkan angka-angkanya untuk mengubah laba. Kelonggaran inilah yang membuat manajemen mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Menurut Haris (2004) kebijakan akrual yang dilakukan karena kondisi perusahaan yang menghendaki *judgement* dan metode akuntansi serta menggeser biaya dan pendapatan bukan karena adanya niat dari manajemen disebut *nondiscretionary accruals*. Sedangkan jika kebijakan akrual karena tuntutan kondisi perusahaan seperti perbaikan pabrik dengan penyesuaian

kembali umur pabrik, peningkatan pendapatan sehingga harus ada penyesuaian terhadap piutang tak tertagih maka itu disebut *discretionary accruals*.

Healy dan Wahlen (1999) mendefinisikan pengelolaan laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dengan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (magnitude) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yaitu tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Dalam hal ini berarti terdapat dua aspek yaitu intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan pertimbangan, misalnya pertimbangan yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan perkiraan nilai residu aktiva, tanggung jawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan menurunkan nilai aset. Selain itu juga pilihan untuk metode akuntansi, misalnya metode penyusutan dan metode biaya. Aspek kedua yaitu tujuan manajemen laba untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan ketika manajemen mempunyai informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

2.1.6.2. Motivasi Pengelolaan Laba

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya pengelolaan laba. Teori akuntansi positif (*Positif Accounting Theory*) mengusulkan tiga hipotesis motivasi pengelolaan laba, yaitu:

1. Hipotesis program bonus (*the bonus plan hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan *bonus plan* akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba setinggi mungkin. Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan pemberian bonus yang berdasarkan pada laba akuntansi, cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan.

2. Hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*)

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Dinyatakan pula jika perusahaan mulai mendekati suatu pelanggaran terhadap (*debt covenant*), maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari terjadinya (*debt covenant*) dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Pelanggaran terhadap (*debt covenant*) dapat menimbulkan suatu biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan meningkatkan laba perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut.

3. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*)

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan

menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis, diantaranya muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politis.

2.1.6.3. Pola Pengelolaan Laba

Pola pengelolaan laba menurut Scoot (2000) dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

2. *Income Minimazation*

Dilakukan pada saat perusahaan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun, tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

5. *Offsetting extraordinary/unusual gains*

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan trend laba.

6. *Aggressive accounting applications*

Teknik yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

7. *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

2.1.6.4. Teknik Pengelolaan Laba

Dalam melakukan perekayasaan atas laporan keuangan, terdapat teknik yang dapat dilakukan, menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi.

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, menunda atau mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.1.7. Mekanisme *Corporate governance*

Definisi *Corporate Governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dalam publikasi yang pertamanya menggunakan definisi *Cadbury Committee* adalah :

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Pada prinsipnya tujuan *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam

pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) memaparkan azas-azas GCG sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibility (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.7.1. Dewan Komisaris

Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Menurut KNKG(2006) anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris yang terafiliasi (*non independent*) adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan

Istilah dan keberadaan Komisaris Independen baru muncul setelah terbitnya Surat edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tgl 21 Juli 2001. Menurut ketentuan tersebut

perusahaan publik yang tercatat di bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen.

Keberadaan komisaris independen ini rupanya berhubungan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), antara lain:

1. Jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.
2. Perlunya dibentuk komite audit.
3. Keharusan perusahaan memiliki sekretaris perusahaan

Fungsi dewan komisaris termasuk anggota komisaris independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut:

1. Mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
2. Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG

2.1.7.2. Komite Audit

Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-103/MBU/2002, pengertian komite audit adalah suatu badan yang berada di bawah komisaris yang beranggotakan minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan anggota BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

2.1.7.3. Dewan Komisaris Independen

Keberadaan dewan komisaris belum memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *Corporate Governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor. Untuk mendorong implementasi GCG, dibuatlah sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan GCG di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia (Surya dan Yustivandana, 2006). Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah dewan komisaris independen dan komite audit.

Surya dan Yustivandana (2006) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, maupun pemegang saham publik. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Keberadaan dewan komisaris independen telah diatur dalam peraturan BEI yang mewajibkan

perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki dewan komisaris independen sekurang- kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris.

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi (Surya dan Yustivandana, 2006):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
4. Memonitor pelaksanaan *governance* dan melakukan perubahan jika diperlukan.

5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

2.1.8. Variabel Kontrol

2.1.8.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sering digunakan sebagai variabel kontrol untuk penelitian mengenai pengungkapan sosial perusahaan. Hal ini didasarkan pada teori agensi yaitu perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Menurut Sembiring (2005), perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.8.2. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan ekuitas. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan (John, 2005). Beberapa penelitian menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan didasarkan pada *stakeholder theory*. *Stakeholder theory* menjelaskan adanya hubungan antara kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan (Sun *et al.* 2010). Perusahaan dengan manajemen yang memiliki

pengetahuan akan mampu menciptakan profit dan akan memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam konteks teori keagenan, manajemen yang *profitable* akan menyajikan informasi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung posisi para manajer yang bersangkutan dan mendapatkan kompensasi. Sedangkan menurut teori legitimasi, profitabilitas dapat dipandang sebagai variabel yang diprediksikan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik secara negatif maupun positif tergantung apakah perusahaan mengalami rugi atau mendapatkan laba.

2.1.8.3. *Leverage*

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat *leverage* perusahaan, dengan demikian menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976).

1.6. Penelitian Terdahulu

Patten dan Trompeter (2003) meneliti pengaruh antara tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan pengelolaan laba dengan menggunakan sampel

penelitian 40 perusahaan kimia yang terkena dampak dari *chemical leak* di Bhopal, India. Kejadian ini menimbulkan tekanan politik yang cukup besar dan mengarah pada terjadinya *political cost*. Patten dan Trompeter mengatakan bahwa CSR dan EM (*earning management*) merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif *political cost*. Pengukuran EM berdasarkan residual atau perubahan pada *discretionary accruals*. Hasil penelitian Patten dan Trompeter membuktikan adanya *discretionary accruals* negatif yang signifikan pada periode terjadinya *Bhopal chemical leak*. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan positif antara *environmental disclosure* dengan *discretionary accruals*. Perusahaan dengan tingkat *environmental disclosure* yang rendah pada periode sebelum *Bhopal chemical leak* cenderung mengurangi *income* dengan *discretionary accruals* yang negatif pada periode terjadinya *Bhopal chemical leak*.

Nasution dan Setiawan (2007) menguji hubungan *discretionary accrual* sebagai variabel dependen dengan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut adalah keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap akrual kelolaan (diskresioner laba) dan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap diskresioner laba secara parsial. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Chih *et al.* (2008) menguji empat hipotesis yang berkaitan dengan hubungan CSR dengan EM. *Myopia avoidance hypothesis*, berdasarkan hubungan

negatif yang terjadi antara CSR dan EM; *predictable earnings hypothesis*; *multiple earnings hypothesis*, yang menunjukkan hubungan positif antara CSR dan EM; dan yang terakhir adalah *institutional hypothesis*, yang menunjukkan hubungan netral antara CSR dan EM. Mereka melakukan penelitian efek CSR terhadap informasi yang disajikan dengan sampel 1.653 perusahaan di 46 negara periode 1993-2002.

Penelitian yang dilakukan oleh Sun *et.al.* (2010) meneliti pengaruh pengelolaan laba terhadap *corporate environmental disclosure* dengan asumsi dasar perusahaan yang melakukan pengelolaan laba mempunyai insentif untuk melakukan *corporate environmental disclosure* (CED) sebagai alat untuk mengacaukan perhatian *stakeholders* atas kecurangan tersebut. Penelitian Sun *et.al* (2010) ini dilakukan pada semua perusahaan yang terdaftar di *Financial Times* dan *the London Stock Exchange* (FTSE) periode 1 April 2006 sampai 31 Maret 2007. Sampel akhir yang didapat adalah 245 perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara EM dan CED, begitu pula ukuran dewan komisaris sebagai variabel moderating. Sedangkan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengaruh pengelolaan laba terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel penelitian		Analisis statistik	Hasil penelitian
		Dependen	Independen		

1.	Patten dan Trompeter (2003)	Manajemen laba	Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan	Regresi berganda	Hasil penelitian membuktikan adanya <i>discretionary accruals</i> negatif yang signifikan pada periode terjadinya <i>Bhopal chemical leak</i> . Penelitian ini juga menunjukkan hubungan positif antara <i>environmental disclosure</i> dengan <i>discretionary accruals</i> .
2.	Nasution dan Setiawan (2007)	<i>Discretionary accrual</i>	Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan	Regresi linear berganda	經 Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap akrual kelolaan (diskresioner laba) 經 Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap diskresioner laba secara parsial.
3.	Chih <i>et al.</i> (2008)	Manajemen laba	Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan	Regresi berganda	berdasarkan hubungan negatif yang terjadi antara CSR dan EM; <i>predictable earnings hypothesis</i> ; <i>multiple earnings hypothesis</i> , yang menunjukkan hubungan

					positif antara CSR dan EM; dan yang terakhir adalah <i>institutional hypothesis</i> , yang menunjukkan hubungan netral antara CSR dan EM.
4.	Sun <i>et al.</i> (2010)	Tanggung jawab sosial perusahaan	Manajemen laba Variabel moderating: ukuran dewan komisaris, jumlah pertemuan komite audit	Regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan sedangkan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5.	Prior <i>et al.</i> (2008)	Manajemen laba	Tanggung jawab sosial dan lingkungan	Regresi berganda	Penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif antara CSR dengan EM dan kombinasi praktik CSR dan EM yang berdampak negative terhadap kinerja finansial perusahaan.
6.	Said <i>et al.</i> (2009)	Tanggung jawab sosial dan lingkungan	<i>Board size</i> , proporsi komisaris, <i>dualism</i> CEO, proporsi komisaris yang berada dalam komite audit, konsentrasi kepemilikan saham, proporsi saham yang	Regresi berganda	Hanya terdapat tiga variabel yang berkorelasi dengan pengungkapan CSR yaitu proporsi saham yang dimiliki pemerintah, konsentrasi kepemilikan

			dimiliki direktur eksekutif, proporsi saham yang dimiliki investor asing, proporsi saham yang dimiliki pemerintah		saham, dan komite audit.
--	--	--	---	--	--------------------------

Sumber: Berbagai sumber

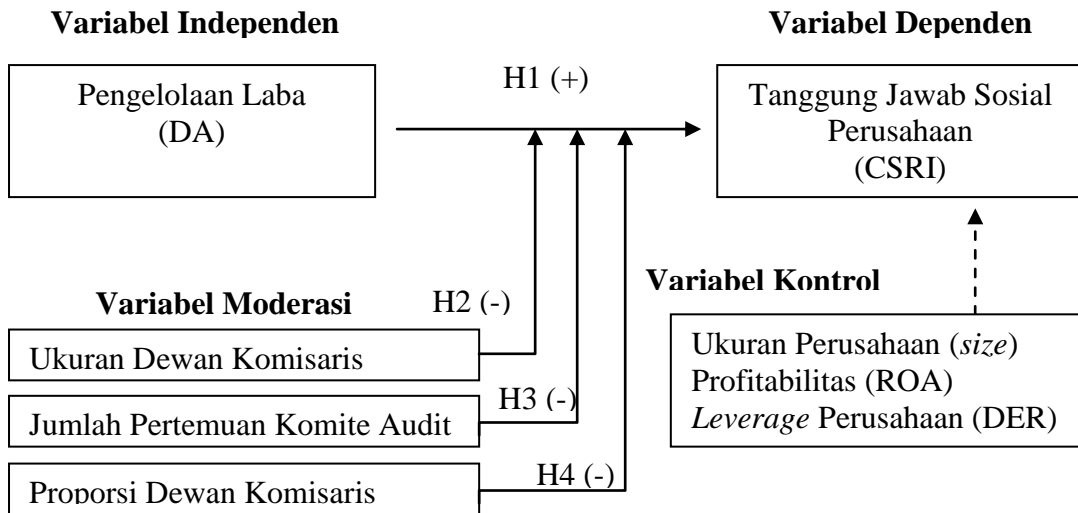
1.7. Kerangka pemikiran

Model Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang menguji pengaruh pengelolaan laba sebagai variabel independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai variabel dependen. Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan pertemuan komite audit merupakan variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan variabel dependen dan independen menjadi positif atau negatif.

Variabel independen dalam penelitian ini yang diprediksi berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu pengelolaan laba yang diproksi dengan *discretionary accrual* (DA) dengan variabel kontrol yaitu profitabilitas diproksi dengan *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage* (DER). Sedangkan Mekanisme *corporate governance* yaitu komite audit diproksi dengan jumlah pertemuan komite audit, dewan komisaris independen yang diproksi dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris dan dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris sebagai variabel moderasi, dapat memperlemah hubungan pengaruh pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Model statistik penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



1.8. Hipotesis

Dalam penelitian ini diusulkan empat hipotesis penelitian sebagaimana digambarkan dalam kerangka pemikiran pada Gambar 2.1. Pengembangan hipotesis penelitian dijelaskan pada sub bab berikut.

2.4.1. Pengaruh Pengelolaan Laba terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pengelolaan laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Investor sebagai *principal* diasumsikan hanya menginginkan hasil investasi mereka bertambah atau mendapat keuntungan. Sedangkan para agen yaitu manajer diasumsikan akan merasa puas bila mereka menerima kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Adanya perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Pengelolaan

kemudian mengalihkan perhatian para investor dengan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan sosial sebuah perusahaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat.

Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat karena mereka menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan membawa dampak bagi lingkungannya. Namun, disamping itu perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini juga memiliki beberapa alasan lain seperti menjaga reputasi perusahaan agar semakin banyak investor tertarik atau agar perusahaan bisa bertahan di lingkungan masyarakat sehingga tidak mengalami penolakan. Lebih jauh lagi, manajer mempunyai dorongan untuk melakukan pengungkapan lingkungan ketika mereka melakukan pengelolaan laba. Konflik agensi muncul ketika manajer secara oportunistik memanipulasi pengelolaan laba karenanya tanggung jawab sosial dan lingkungan dijadikan alat untuk mengamankan kecurangan mereka. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini digunakan untuk mengalihkan perhatian investor dalam mengawasi praktik pengelolaan laba yang dilakukan oleh manajer.

Sun *et.al* (2010) meneliti hubungan pengelolaan laba dan *corporate environmental disclosure* dengan asumsi dasar perusahaan yang melakukan pengelolaan laba mempunyai insentif untuk melakukan *corporate environmental disclosure* (CED) sebagai alat untuk mengacaukan perhatian *stakeholders* atas kecurangan tersebut. Penelitian dilakukan pada semua perusahaan yang terdaftar di *Financial Times* dan *the London Stock Exchange* (FTSE) periode 1 April 2006

sampai 31 Maret 2007. Sampel akhir yang didapat adalah 245 perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan laba dan CED. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Pengelolaan laba yang diukur dengan *discretionary accruals* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diukur dengan *corporate social reporting index*.

2.4.2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dalam Memoderasi Pengaruh Pengelolaan Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Dewan Komisaris memiliki peranan yang penting dalam sebuah perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Jensen (1993) serta Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner *et.al* (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983). Dewan komisaris yang dimaksud adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Menurut Sembiring (2005) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan

semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan ukuran dewan komisaris yang dikemukakan oleh Akhtaruddin *et al.*, (2009) semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian (*experience and expertise*) yang dimiliki dewan komisaris semakin meningkat sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik. Dengan proses monitoring yang lebih baik maka kemungkinan manajer melakukan kecurangan dalam pengelolaan laba juga dapat diminimalkan. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Dewan komisaris yang diukur dengan ukuran dewan komisaris berpengaruh dalam memoderasi pengaruh antara pengelolaan laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

2.4.3. Peran Jumlah Pertemuan Komite Audit dalam Memoderasi Pengaruh Pengelolaan Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Teori agensi menyatakan adanya kepentingan yang berbeda membuat masing-masing pihak yaitu agen dan prinsipal berusaha untuk memperbesar keuntungannya. Kelonggaran yang diberikan atas pemilihan metode akuntansi dapat dimanfaatkan manajemen untuk menghasilkan laba yang berbeda, sehingga praktik ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas laba yang dihasilkan (Boediono, 2006). Komite audit merupakan salah satu komite penunjang dewan komisaris. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal.

Pertemuan formal dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jumlah pertemuan komite audit dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang dibebankan kepada komite audit. Menurut Hidayati (2000) komite audit pada umumnya melakukan pertemuan dua sampai tiga kali dalam setahun yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit dan sebelum RUPS tahunan. Selain melakukan pertemuan formal, komite audit juga melakukan pertemuan informal, misalnya melakukan komunikasi dengan manajemen, akuntan publik dan auditor internal.

Komite audit biasanya membuat agenda rapat dengan menerima masukan dari manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Dengan demikian, semakin banyak jumlah pertemuan audit diharapkan akan semakin membuat informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih *reliable*. Abbot *et al.*, (2004) menemukan bukti bahwa komite audit yang melakukan pertemuan kurang dari jumlah minimum memiliki kemungkinan besar untuk menyajikan kembali labanya. Ia juga menemukan bukti bahwa kecurangan dan penyajian kembali laba semakin banyak terjadi ketika anggota komite audit tidak memiliki kompetensi di bidang keuangan. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Komite audit yang diukur dengan intensitas rapat komite audit berpengaruh dalam memoderasi pengaruh antara pengelolaan laba dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

2.4.4. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Pengelolaan Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

KNKG (2006) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mengawasi aktivitas pengelolaan perusahaan. Sikap independensi dari pihak luar serta memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan aktivitas pengelola perusahaan dan perilaku oportunistik seperti pengelolaan laba.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Klein (2002) membuktikan bahwa besarnya *discretionary accrual* lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari komisaris independen yang jumlahnya sedikit. Hal ini sesuai dengan penelitian Dechow *et al.*,(1996) yang menemukan bahwa perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan manipulasi laba apabila dewan komisaris didominasi oleh jajaran manajemen.

Herawaty (2008) menyatakan bahwa komisaris independen dapat memonitor manajemen dalam rangka menyelaraskan perbedaan kepentingan

antara pemilik dan manajemen. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan semakin meminimalisir tindakan pengelolaan laba yang dilakukan oleh manajer. Xie *et al.*, (2003) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen yang lebih berpengalaman akan mengurangi tindakan manajemen laba yang melakukan pengalihan isu pada tanggung jawab sosial perusahaan. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah :

H4 : Dewan komisaris independen yang diukur dengan proporsi keanggotaanya dalam dewan komisaris berpengaruh dalam memoderasi pengaruh antara pengelolaan laba dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

1.9. Variabel Penelitian dan Definisi Penelitian

Terdapat beberapa tipe variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen atau bebas (X) adalah variabel yang menjadi penduga, variabel dependen atau terikat (Y) yaitu variabel yang diperkirakan nilainya, dan variabel kontrol. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pengelolaan laba, sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diproksikan oleh *corporate social responsibility index* (ICSR). variabel kontrol, yaitu total asset, ROA, *debt to equity ratio* dan variabel moderating yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah pertemuan komite audit.

3.1.1. Variabel Dependen

3.1.1.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan pengungkapan informasi terkait lingkungan yang diungkapkan dalam *annual report* perusahaan (Suratno,dkk.,2006). Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini diproksikan menggunakan ICSR berdasarkan *Global Reporting Initiatives* (GRI). Jumlah item pengungkapan CSR menurut GRI yang sudah disesuaikan dengan perusahaan manufaktur di Indonesia adalah 50 indikator yangmana diantaranya adalah : ekonomi (5 item), lingkungan (14 item),

praktik tenaga kerja (13 item), hak manusia (8 item), masyarakat (2 item), dan tanggung jawab produk (8 item).

Perhitungan tingkat pengungkapan tiap perusahaan menggunakan rumus:

$$\text{CSRI} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \dots\dots\dots 3.1$$

Dimana:

CSRI : *Corporate Social Responsibility Disclosure* Index perusahaan j

n_j : jumlah item untuk perusahaan j, n_j = 50

X_{ij} : 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, 0 < CSRI < 1

3.1.2. Variabel Independen

3.1.2.1. Pengelolaan Laba

Pengelolaan laba adalah metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur *discretionary accruals* dalam literatur Jones (1991). Namun, Kothari *et al.* (2005) berpendapat bahwa mengukur *discretionary accruals* tanpa mengontrol kinerja perusahaan akan menghasilkan *misspecification* dalam model pengelolaan laba. oleh karena itu, mereka mengajukan model yang mencakup dan mengontrol terhadap kinerja perusahaan menggunakan *Return on asset* (ROA) untuk mengurangi heteroskedastisitas bermasalah dan masalah mis-spesifikasi yang timbul karena ada model agregat akrual yang lain. Menurut Kothari *et al.* (2005) kinerja disesuaikan model *discretionary accruals* dengan kode SIC dua-digit untuk memperkirakan *discretionary accruals*.

Total akrual (TA_{it}) yang diukur dengan selisih antara laba bersih (NI_{it}) dan arus kas bersih dari aktivitas operasi (CFO_{it}) sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots 3.2$$

Discretionary accruals sebagai proksi pengelolaan laba dihitung dengan model sebagai berikut:

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_i [1/A_{it-1}] + \beta_{1i} [(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1}] + \beta_{2i} [PPE_{it} / A_{it-1}] + \beta_{3i} [ROA_{it} / A_{it-1}] + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots 3.3$$

Dengan menggunakan koefisien regresi (*standardized coefficients*) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ di atas maka dapat dihitung nilai *nondiscretionary accrual* (NDA) dengan rumus :

$$NDA_{it} = \alpha_i (1 / TA_{it-1}) + \beta_{1i} ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + \beta_{2i} (PPE_{it} / TA_{it-1}) + \beta_{3i} (ROA_{it} / TA_{it-1}) + \varepsilon \dots\dots\dots 3.4$$

Discretionary accrual (DA) merupakan residual yang diperoleh dari estimasi total *accrual* yang dihitung sebagai berikut :

$$DA_{it} = (TA_{it} / A_{it-1}) - NDA_{it} \dots\dots\dots 3.5$$

Keterangan:

- TA_{it} Total akrual perusahaan i tahun t
- ΔREV_{it} Perubahan pendapatan i perusahaan antara tahun t dan t-1
- ΔREC_{it} Perubahan piutang perusahaan i antara t tahun dan t-1
- PPE_{it} Tingkat aset kotor, investasi, dan peralatan perusahaan i tahun t
- ROA_{it} *Return on Asset* perusahaan i pada tahun t.
- A_{it-1} Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

DA it *Discretionary accrual* perusahaan I tahun t

3.1.3. Variabel Moderating

Variabel moderating merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2001). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderating antara pengelolaan laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* internal dan eksternal lainnya sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FGCI, 2005). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan jumlah pertemuan komite audit.

3.1.3.1. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen anggota dewan komisaris lainya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainya yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen dapat bertindak penengah dalam penyelesaian yang terjadi diantara manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen (Ujiyanto dan Pramuka, 2007), dalam penelitian ini proporsi komisaris independen dihitung dengan cara:

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

3.1.3.2. Jumlah Pertemuan Komite Audit

Jumlah pertemuan komite audit merupakan banyaknya jumlah rapat yang dilakukan komite audit dalam satu tahun. Penelitian Putri (2009) yang menemukan adanya hubungan antara jumlah pertemuan komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba perusahaan. Hal ini berarti, semakin sering komite audit mengadakan pertemuan maka pengungkapan informasi laba perusahaan semakin transparan. Jumlah pertemuan komite audit diukur dengan menghitung total pertemuan audit yang dilakukan komite audit yang dilakukan selama satu tahun.

3.1.3.3. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Sembiring (2005) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen

3.1.4. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Aditya, 2009). Dengan kata lain, keberadaan variabel baik dependen maupun independen tersebut dikendalikan (dikontrol) oleh variabel kontrol tersebut. Dengan mengendalikan beberapa variabel tersebut, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat merupakan pengaruh yang

bersih (murni) dan variabel yang dikendalikan tersebut tidak lagi mencemari variabel terikatnya. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu :

3.1.4.1. Ukuran Perusahaan

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) diproksikan berdasarkan total asset yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan sampel. Untuk mendapatkan hasil total asset yang lebih baik dan valid, maka langkah untuk mengatasinya adalah melakukan transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma natural dari data itu sendiri. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \log (\text{nilai buku total aset})$$

3.1.4.2. Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor baik pemegang obligasi maupun pemegang saham (Riyanto, 2001). Rasio ini merupakan rasio yang terpenting untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan. *Return on asset* merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak (EAT)}}{\text{Total aktiva}}$$

Total aktiva

3.1.4.3. *Leverage*

Rasio *leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak dibiayai oleh investor atau kreditur luar. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang. Rasio *leverage* dalam penelitian ini diukur dengan membagi total utang dengan jumlah ekuitas perusahaan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Total Debt

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Total Ekuitas

Variabel dan Pengukuran

Tabel 3.1

No	Variabel	Dimensi	Indikator pengukuran Variabel	Skala Pengukuran
1.	Variabel dependen: Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	Merupakan pengungkapan informasi terkait lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan (suratno,dkk.,2006)	$\text{CSRI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$	Rasio

2.	Variabel independen: Pengelolaan laba	Akrealisasi laba sebagai tindakan oportunistik manajer. proksi yang digunakan adalah nilai absolute dari <i>discretionary accruals</i> yang dihitung menggunakan model modified Jones (Khotari <i>et al.</i> ,2005)	Model modified jones $TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_i [1/A_{it-1}] + \beta_{1i} [(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1}] + \beta_{2i} [PPE_{it} / A_{it-1}] + \beta_{3i} [ROA_{it} / A_{it-1}] + \varepsilon_{it}$	Rasio
3.	Variabel moderasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ komisaris independen ▪ Pertemuan komite audit ▪ Ukuran dewan komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Yaitu proporsi jumlah dewan komisaris independen (xie <i>et al.</i>,2003) Tingkat aktivitas komite audit diproksi dengan frekuensi pertemuan dewan komite audit (xie <i>et al.</i>, 2003) Merupakan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris (Sun <i>et al.</i> 2010) 	<ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris Jumlah pertemuan komite Audit yang diungkapkan dalam <i>annual report</i> pada bagian <i>corporate governance</i> Jumlah Seluruh anggota dewankomisaris 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio Rasio
4.	Variabel Kontrol <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ukuran Perusahaan ▪ Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Total asset, total asset dihitung dari jumlah asset lancar + asset tidak lancar (chih <i>et al.</i>,2008) Rasio laba bersih setelah pajak terhadap asset 	<ul style="list-style-type: none"> Ln Total asset ROA = Laba bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leverage</i> 	(Chih <i>et al.</i> , 2008) Tingkat solvabilitas dihitung dari jumlah (hutang lancar+hutang tidak lancar) terhadap ekuitas (Chih <i>et al.</i> , 2008)	setelah pajak (EAT) / total aktiva $\text{LEV} = 100\% \times \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
--	---	---	---	-------

1.10. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Ghozali, 2009). Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dari di BEI tahun 2012 dan 2013.
2. Perusahaan bergerak dalam bidang manufaktur karena perusahaan dalam satu jenis industri yaitu manufaktur cenderung memiliki karakteristik akrual yang hampir sama
3. Perusahaan sampel mempublikasi *annual report* untuk tahun bersangkutan dan memiliki kelengkapan data mengenai proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, rapat komite audit dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada periode bersangkutan yang telah diaudit dan dipublikasikan.

1.11. Jenis Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari situs bursa efek Indonesia (www.idx.co.id). Data tersebut berupa laporan keuangan dan *annual report* yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

1.12. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data sekunder. Studi kepustakaan diperoleh dari literatur, artikel dan jurnal yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

1.13. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Model Regresi I

$$\text{CSRI} = \lambda_0 + \lambda_1 \text{DA} + \lambda_2 \text{ROA} + \lambda_3 \text{Size} + \lambda_4 \text{DER} + \lambda_5 \text{DER}$$

Model Regresi II

$$\text{CSRI} = \lambda_0 + \lambda_1 \text{DA} + \lambda_2 \text{DK} + \lambda_3 \text{PKA} + \lambda_4 \text{DKI} + \lambda_5 \text{DA*DK} + \lambda_6 \text{DA*PKA} + \lambda_7 \text{DA*DKI} + \lambda_8 \text{ROA} + \lambda_9 \text{Size} + \lambda_{10} \text{DER} + \lambda_{11} \text{DER} + \varepsilon$$

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,

sum, range, kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai mekanisme *corporate governance*, pengelolaan laba, ukuran perusahaan, profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas dan uji autokorelasi.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nilai residual seharusnya terdistribusi dengan normal atau mendekati normal bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi residual terdistribusi secara normal atau tidak, yaitu :

a. Analisis Grafik

Salah satu yang paling mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dengan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Suatu data dikatakan terdistribusi normal bila *asymptotic significance* lebih dari 0.05 (Hair *et al.*, 1998). Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov adalah :

- Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan $< 0,05$ secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan $> 0,05$ secara statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai-nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Selain itu untuk mendukung hasil grafik plot yang ada, maka dilakukan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas (Ghozali, 2009). Jika variabel *dependen* signifikan secara statistik mempengaruhi variabel *independen*, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser persamaannya sebagai berikut :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

U_t = Variabel residual

V_i = Variabel kesalahan

3.5.2.3. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel *independen* dalam model regresi. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2009). Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel *independen* yang nilainya lebih dari 95%.

Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak, diperlukan uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model penelitian dapat menggunakan Uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel penjelas. Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : tidak ada gejala autokorelasi positif pada model ($r = 0$)

H_a : ada gejala autokorelasi positif pada model ($r \neq 0$)

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu

persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Tabachnick, 1996).

Menurut Gujarati (2003) asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS) adalah :

- a Model regresi linear artinya linear dalam parameter seperti dalam persamaan dibawah ini :

$$Y_i = b_1 + b_2 X_1 + u_i$$

- b Nilai X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
- c Nilai rata-rata kesalahan adalah nol, atau $E(u_i/X_i) = 0$
- d Homoskedastisitas artinya *variance* kesalahan sama untuk setiap periode (Homo = sama, Skedastisitas = sebaran) dan dinyatakan dalam bentuk matematis $Var(u_i/X_i) = \sigma^2$
- e Tidak ada autokorelasi antar kesalahan (antara u_i dan u_j tidak ada korelasi) atau secara matematis $Cov(u_i, u_j/X_i, X_j) = 0$
- f Antara u_i dan X_i saling bebas, sehingga $Cov(u_i/X_i) = 0$
- g Jumlah observasi, n , harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel bebas)
- h Adanya variabilitas dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda.
- i Model regresi telah dispesifikasi secara benar. Dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik.

j Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas.

Dalam penelitian ini model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

Model Regresi I

$$\text{CSRI} = \lambda_0 + \lambda_1 \text{DA} + \lambda_2 \text{ROA} + \lambda_3 \text{SIZE} + \lambda_4 \text{DER} + \lambda_5 \text{LEV}$$

Model Regresi II

$$\text{CSRI} = \lambda_0 + \lambda_1 \text{DA} + \lambda_2 \text{DKI} + \lambda_3 \text{PKA} + \lambda_4 \text{DK} + \lambda_5 \text{DA} * \text{DKI} + \lambda_6 \text{DA} * \text{PKA} + \lambda_7 \text{DA} * \text{DK} + \lambda_8 \text{ROA} + \lambda_9 \text{SIZE} + \lambda_{10} \text{DER} + \lambda_{11} \text{DER} + \varepsilon$$

Keterangan :

CSRI : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

DA : Pengelolaan laba

DKI : Proporsi komisaris independen

DK : Ukuran dewan komisaris

PKA : Pertemuan komite audit

ROA : *Return on asset*

SIZE : Total asset

DER : *Debt to equity ratio*

λ_0 : Konstanta

$\lambda_1 - \lambda_8$: Koefisien

ε : Error

3.5.4. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji-t sementara pengujian secara bersama-sama dilakukan dengan uji-F pada level 5% ($\alpha = 0,05$) (Ghozali, 2009).

3.5.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2009). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

3.5.4.2. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama.

- a Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
- b Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan versi 16.0. Jika angka

signifikansi F lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

3.5.4.3. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat.

- a Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- b Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan versi 16.0. jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.